

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Menurut Permen No 113 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.1
Nama Desa di Kecamatan Padangratu

No	Nama Desa
1	Purwosari
2	Sendangayu
3	Bandarsari
4	Surabaya
5	Margorejo
6	Kotabaru
7	Karangtanjung
8	Kuripan
9	Sriagung
10	Haduyangratu
11	Padangratu
12	Karangsari
13	Mojokerto

Tabel 4.1
Nama Desa di Kecamatan Padangratu
(Lanjutan)

14	Sumbersari
15	Purworejo

Sumber: data diminta dari Kecamatan Padangratu

Tabel 4.2
Karakteristik Data Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner
1	Kuisisioner yang dikirim	75
2	Kuisisioner yang kembali	57
3	Kuisisioner yang tidak kembali	18
4	Presentasi pengembalian	76%
5	Kuisisioner yang tidak dapat digunakan	4
6	Kuisisioner yang diolah	53
7	Presentasi kuisisioner yang diolah	71%

Sumber: Data diolah, 2018

Fokus responden yang telah ditetapkan dari masing-masing desa telah ditetapkan peneliti sebanyak 5 dengan kriteria responden adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan aparatur desa. Penyebaran Kuisisioner dilakukan pada tanggal 22 desember 2017 sampai dengan 06 januari 2018. Sehingga dapat diketahui responden yang ada sebanyak 75 responden (5 x 15). Alat ukur penelitian ini berupa kuisisioner dengan skala pengukuran likert. Dengan skala likert maka jawaban setiap item instrument dinilai dari 1 sampai 5. Dengan bentuk:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Netral (N) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

4.2 Karakteristik Data Responden

Data responden berisi informasi yang disajikan, antara lain: umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan jabatan pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini adalah data responden yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Demografi Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur			
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	20-30 Tahun	28	53%
2	30-40 Tahun	20	38%
3	> 40 Tahun	5	9%
Jumlah		53	100%
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin			
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	47	89%
2	Perempuan	6	11%
Jumlah		53	100%
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir			
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	39	73%
4	S1	14	27%
Jumlah		53	100%

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan			
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Kampung	11	21%
2	Sekretaris	12	23%
3	Bendahara	13	24%
4	Kaur	17	32%
5	Kadus	0	0%
6	Rt	0	0%
7	Operator	0	0%
Jumlah		53	100%

Sumber: Data diolah manual, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 demografi responden diatas dapat dilihat bahwa karakteristik umur menunjukkan responden yang memiliki umur 20-30 berjumlah 28 orang dengan persentase 53%, responden yang memiliki umur 30-40 berjumlah 20 orang dengan persentase 38% sedangkan responden yang memiliki umur lebih dari 40 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 9%.

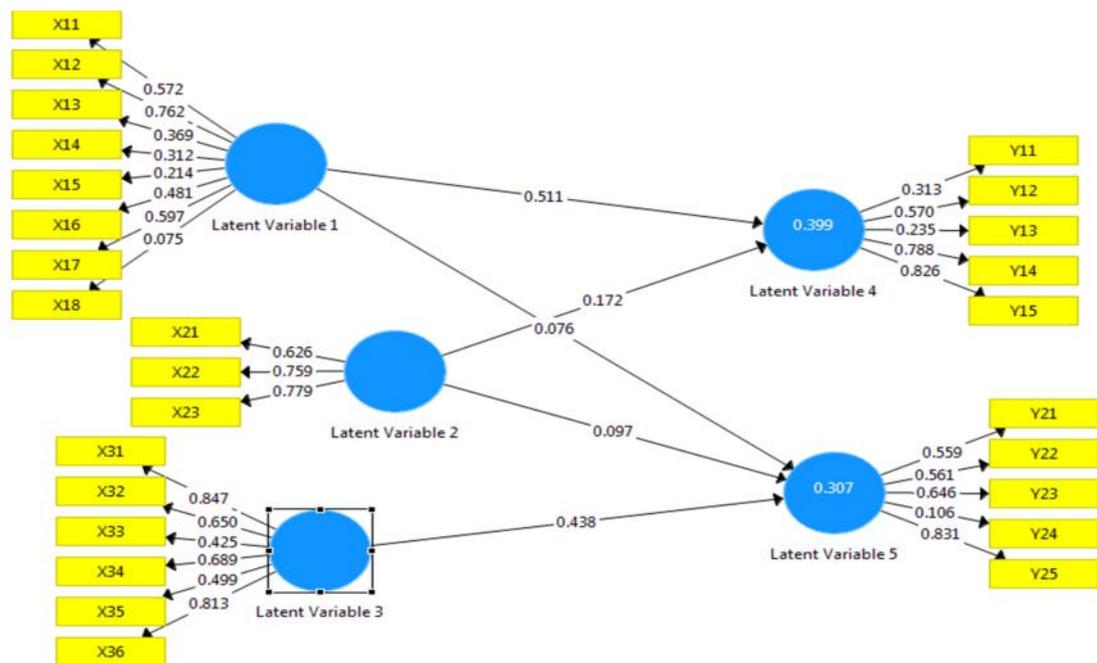
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki memiliki data berjumlah 47 orang dengan persentase sebesar 89% sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang dengan persentase 11%.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir memiliki data diantaranya responden yang memiliki pendidikan terakhir SD berjumlah 0 orang dengan persentase sebesar 0%, sedangkan responden memiliki pendidikan terakhir SMP berjumlah 0 orang dengan persentase sebesar 0%, responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA berjumlah 39 orang dengan persentase 73% dan responden yang memiliki pendidikan terakhir Strata 1(S1) berjumlah 14 orang dengan persentase 27%. Karakteristik responden berdasarkan jabatan memiliki data diantaranya responden yang memiliki jabatan sebagai kepala kampung berjumlah 11 orang dengan persentase sebesar 21%, responden yang memiliki

jabatan sebagai sekretaris berjumlah 12 orang dengan persentase sebesar 23%, responden yang memiliki jabatan sebagai bendahara berjumlah 13 orang dengan persentase sebesar 24%, responden yang memiliki jabatan sebagai kaur berjumlah 17 orang dengan persentase sebesar 32%, responden yang memiliki jabatan sebagai kadus berjumlah orang dengan persentase sebesar 0%, responden yang memiliki jabatan sebagai rt berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, dan operator berjumlah o orang dengan persentase sebesar 0%.

4.3 Uji Analisis Data

4.3.1 Outer Model



Sumber : Hasil Pengolahan Data *SmartPLS 3.0*, 2018

Gambar 4.1 Full Model Struktural

Keterangan:

X1: Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

X2: Aksesibilitas

X3: Pengendalian Internal

Y1: Transparansi

Y2: Akuntabilitas

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan SmartPLS 3.0 dapat dilakukan penghapusan variabel apabila memiliki nilai $< 0,5$ dengan nilai yang diharapkan sebesar $0,7$. Dari *full structure* model yang telah diolah dilakukan penghapusan yaitu pada indikator X13,X14,X15,X16,X18,X33,X35,Y11,Y12,Y13,Y21,Y22, Y24. Setelah mengalami penghapusan dapat dinyatakan bahwa semua nilai indikator telah memenuhi dan dapat dikatakan valid.

Di dalam pengujian outer loading dapat dilihat dari nilai *Outer Loading*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted (Ave)*. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian pada nilai AVE yaitu terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhi nilai AVE yang diharapkan yaitu $>0,5$, maka dilakukan penghapusan pada indikator-indikator variabel yang memiliki nilai $<0,5$ yaitu pada variabel X1, X3, Y1, Y2 berdasarkan dengan nilai indikator terkecil pada setiap variabelnya.

Hasil Uji *Discriminant Validity* dengan *Composite reliability* dan AVE

Tabel 4.5
***Composite reliability* dan AVE data valid**

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted</i>
X1	0.772	0.532
X2	0.762	0.523
X3	0.863	0.616
Y1	0.883	0.790
Y2	0.785	0.650

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SmartPLS* 3.0, 2018

Uji composite reliability seluruh variabel yang telah diolah dinyatakan reliable hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* seluruh variabel dalam penelitian berada diatas 0.7, hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini reliable karena telah memenuhi criteria *Composite reliability*.

Uji Average Variance Extracted seluruh variabel yang telah diolah dinyatakan telah memenuhi hal ini ditunjukkan dengan nilai lebih dari 0,5 seperti yang diharapkan pada uji *average variance extracted*.

Uji discriminant validity menggambarkan korelasi antara variabel dengan nilai korelasi cross loading seluruh indikator yang digunakan dalam membentuk variabel laten dinyatakan valid apabila nilai korelasi *ccross loading* variabel latennya yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain. Nilai korelasi *cross loading* masing-masing variabel dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Discriminant Validity dengan Ccross Loading

	X1	X2	X3	X4	X5
X11	0.753	0.314	0.456	0.339	0.319
X12	0.786	0.482	0.447	0.404	0.087
X17	0.641	0.513	0.378	0.333	0.179
X21	0.222	0.541	0.187	0.191	0.239
X22	0.401	0.797	0.519	0.472	0.186
X23	0.588	0.800	0.476	0.438	0.315
X31	0.436	0.463	0.867	0.523	0.509
X32	0.326	0.355	0.653	0.343	0.302
X34	0.487	0.523	0.709	0.499	0.337
X36	0.579	0.489	0.884	0.523	0.537
Y14	0.369	0.493	0.464	0.880	0.399
Y15	0.500	0.459	0.608	0.898	0.310
Y23	0.200	0.301	0.312	0.299	0.690
Y25	0.245	0.266	0.547	0.386	0.908

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SmartPLS* 3.0, 2018

4.3.2 Pengujian Inner Model

Pengujian ini dilakukan untuk validasi model secara keseluruhan yaitu gabungan inner model dan outer model. Nilai Gof diperoleh dari *average communalities index* dikalikan dengan R^2 model. Menurut (Tenenhaus, 2004) dalam (Hussein, 2015). Evaluasi inner model dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiga cara tersebut adalah dengan melihat dari $R^2 \cdot Q^2$ dan Gof. Berikut ini adalah hasil pengujian inner model dengan ukuran R-Square adalah sebagai berikut:

Pengujian Inner Model Diukur Menggunakan R Square

Tabel 4.7

R-Square

Variabel	R square
Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (X1)	
Aksesibilitas (X2)	
Pengendalian Internal (X3)	
Transparansi (Y1)	0.333
Akuntabilitas (Y2)	0.315

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SmartPLS* 3.0, 2018

Berikut untuk pengujian inner model dapat dilakukan dengan melihat Q^2 (predictive relevance). Untuk mengetahui Q^2 dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2)(1 - R2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.333)(1 - 0.315)$$

$Q^2 = 0.457$ Yang terakhir adalah dengan nilai *Goodness of Fit* (GoF). Menurut (Tenenhaus, 2004) dalam (Hussein, 2015) berbeda dengan CB-SEM, untuk mengetahui nilai GoF pada PLS-SEM dilakukan dengan cara manual yaitu sebagai berikut :

$GoF = \sqrt{AVE + R^2}$ (Tenenhaus, 2004) dalam (Hussein, 2015)

$GoF = \sqrt{0,622 \times 0,130}$

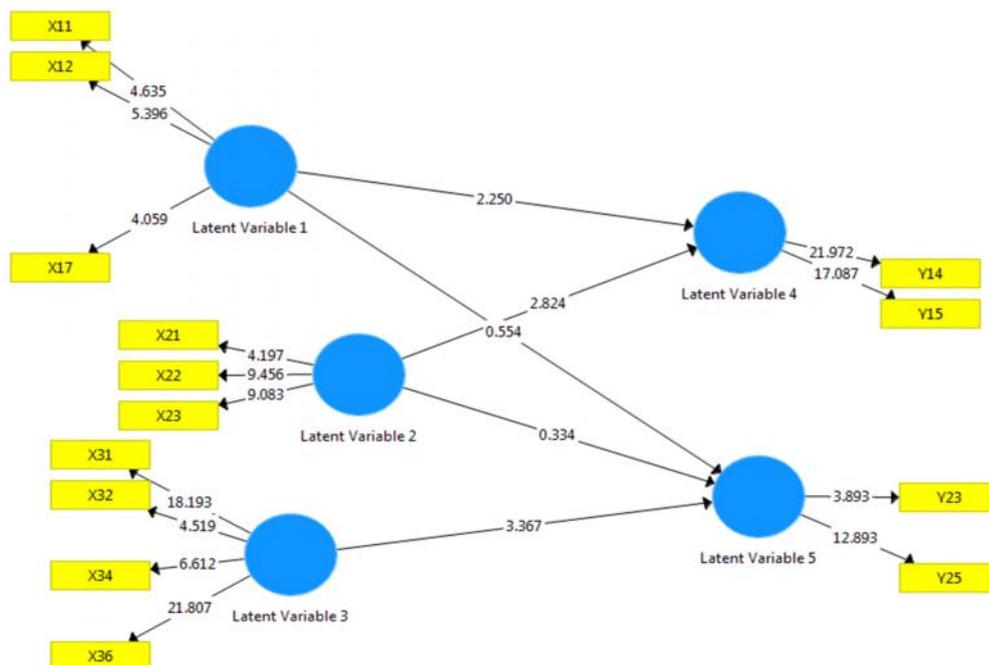
$GoF = 0,284$

Menurut Tenenhaus (2004) dalam Hussein (2015), nilai *GoF small* = 0.1, *GoF medium* = 0.25, dan *GoF besar* = 0.38. Dari pengujian R^2 , Q^2 dan *GoF* terlihat bahwa model yang dibentuk adalah medium.

4.3.3 Pengujian Hipotesa

4.3.3.1 Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Hasil pengujian hipotesis didapatkan dari pengujian *Bootstaping* dengan menggunakan bantuan *Software SmartPLS 3.0* hasil pengujian disajikan sebagai berikut:



Sumber: hasil pengolahan data Smart PLS 3.0, 2017

Gambar 4.2 Hasil pengujian *Bootsraping*

Hasil uji t statistik

Pada penelitian ini hipotesis dilihat dari nilai T statistiknya. Variabel eksogen dinyatakan signifikan pada variabel endogennya apabila hasil dari T statistiknya > T tabel 1.96 (Sig=5%). Hasil T statistic masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Output Path Coefficient

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
XI->Y1	0.270	0.286	0.120	2.250	0.025
X1->Y2	0.335	0.321	0.183	0.554	0.580
X2->Y1	0.375	0.385	0.133	2.824	0.005
X2->Y2	0.060	0.080	0.180	0.334	0.739
X3->Y2	0.581	0.574	0.173	3.367	0.001

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SmartPLS* 3.0, 2018

Berdasarkan tabel diatas dari hasil Uji Output Path Coefficient diatas dapat dilihat pengaruh antar variabelnya. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t statistik pada variabel penyajian laporan pertanggungjawaban(X1) terhadap transparansi(Y1), aksesibilitas(X2) terhadap transparansi(Y1), pengendalian internal(X3) terhadap akuntabilitas(Y2) memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai $t > 1,96$ (Sig=5%). Hasil original sample bernilai positif menunjukkan pengaruh yang searah (positif) antar variabel.

Sedangkan untuk hubungan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban(X1) terhadap akuntabilitas(Y2), aksesibilitas(X2) terhadap transparansi(Y2), memiliki pengaruh yang tidak signifikan dikarenakan memiliki nilai $t < 1,96$ (Sig=5%). Hasil original sample bernilai negatif menunjukkan pengaruh yang tidak searah (negatif) antar variabel.

Berikut ini adalah hasil penelitian dari Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hipotesis

Hipotesis Penelitian	Hasil Uji
Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Transparansi	Ha diterima
Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas	Ha ditolak
Aksesibilitas Terhadap Transparansi	Ha diterima
Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas	Ha ditolak
Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas	Ha diterima

4.4 Pembahasan

1. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Transparansi

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010) dalam (Christiana, 2017. Menurut (Nordiawan, 2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015).

Dari hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini dengan notasi (H1) ditemukan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi, hasilnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban yang mempengaruhi transparansi. Hal ini terlihat dari nilai t statistik pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai t yang lebih besar dari 1.96 (Sig=0.5%).

Terdapat Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi yang terdapat di desa-desa yang bertempat di kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah. Ditemukannya hasil yang berpengaruh dari penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pada desa-desa yang terdapat di kecamatan padangratu ini menunjukkan bahwa aparatur desa telah melaporkan laporan pertanggungjawaban secara baik yaitu dengan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dengan adanya pelaporan pertanggungjawaban secara transparansi ini mampu mencegah adanya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

2.Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi

Aksesibilitas Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Ichlas, dkk, 2014). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, Pasal 4 ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya

publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Dari hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini dengan notasi (H2) ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi, hasilnya Aksesibilitas mempengaruhi Transparansi. Hal ini terlihat dari nilai t statistik pada Aksesibilitas Terhadap Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai t yang lebih besar dari 1.96 (Sig=0.5%).

Untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dibutuhkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Terdapatnya pengaruh antara aksesibilitas terhadap transparansi dapat dikarenakan aksesibilitas yang baik yang terdapat di desa-desa di kecamatan padangratu, dimana semakin baik akses yang diberikan maka mempermudah dalam memperoleh informasi yang terdapat di desa dan dapat membantu terciptanya transparansi yang baik.

3.Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan pada PP No. 24 tahun 2005, hal ini berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus

dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2006). akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010).

Dari hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini dengan notasi (H3) ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas, hasilnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban tidak mempengaruhi akuntabilitas. Hal ini terlihat dari nilai t statistik pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas memiliki tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai t yang lebih kecil dari 1.96 (Sig=0.5%).

Tidak terdapat pengaruh antara Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas yang terdapat di desa-desa yang bertempat di kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah, penelitian ini bisa terjadi dikarenakan belum memaksimalkan penyajian laporan pertanggungjawaban dimana standar dari penyajian laporan pertanggungjawaban yaitu sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga belum tercipta penyajian laporan pertanggungjawaban yang baik yaitu terciptanya akuntabilitas.

4. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas

Aksesibilitas Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Ichlas, dkk, 2014). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Sabeni dan Ghazali, 2001) menyatakan “ akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan

suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawaban kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2014).

Dari hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini dengan notasi (H4) ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas, hasilnya tidak mempengaruhi Aksesibilitas Terhadap akuntabilitas. Hal ini terlihat dari nilai t statistik pada Aksesibilitas terhadap akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai t yang lebih kecil dari 1.96 (Sig=0.5%).

Tidak terdapatnya pengaruh antara aksesibilitas terhadap akuntabilitas pada desa-desa yang terdapat di kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah. Penelitian ini tidak memiliki pengaruh positif hal ini dapat saja terjadi karena masih rendahnya akses pada desa sehingga tidak memungkinkannya masyarakat maupun aparatur untuk melakukan akses laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur desa melalui internet.

5. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi *public* menurut (kalbers, 1995) dalam (Widyatama,dkk, 2017). Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010).

Dari hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini dengan notasi (H5) ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas, hasilnya tidak mempengaruhi Pengendalian Internal Terhadap akuntabilitas. Hal ini terlihat dari nilai t statistik pada Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai t yang lebih kecil dari 1.96 (Sig=0.5%).

Terdapatnya pengaruh pada pengendalian internal terhadap akuntabilitas yang terdapat di desa-desa yang berada dikecamatan padangratu kabupaten lampung tengah. Penelitian ini dapat terjadi dikarenakan sudah maksimalnya kemampuan dalam pengendalian internal yaitu menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja aparatur desa sehingga terdapat pengaruh pada akuntabilitas. Pengendalian internal yang baik pada aparatur desa dapat menciptakan pelaporan pertanggungjawaban secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.